

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal berdirinya Indonesia, menerapkan memilih demokrasi dalam sistem politiknya. Rakyat menjadi pemilik kekuasaan tertinggi dalam Negara yang didiaminya. Montesqueiu dalam trias politiknya membagi kekuasaan menjadi tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rakyat mempunyai kewenangan untuk memilih orang-orang atau kader partai politik untuk duduk di lembaga tersebut khususnya dalam pilkada dan pemilu. Oleh karena itu orang yang duduk dalam ketiga lembaga tersebut menjadi pelayan yang bekerja demi kesejahteraan rakyat.

Indonesia sendiri melaksanakan dan mendukung sistem politik yang demokratis melalui pemilihan umum (pemilu). Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan implementasi paling dasar dalam demokrasi Indonesia. Selain itu, pemilihan umum menjadi langkah untuk melembagakan kedaulatan rakyat secara efektif. Mekanisme demokrasi melalui pilkada langsung akan semakin membuka ruang partisipasi bagi masyarakat lebih luas dalam menentukan dan memilih calon pemimpin politik lokal dibandingkan dengan sistem demokrasi perwakilan yang

lebih banyak meletakkan kekuasaan pada segelintir orang atau mendukung hanya dari beberapa pihak saja (Kolusi).

Pada tahun 2018, komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Pilkada serentak 2018. Pilkada serentak yang dilaksanakan di 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Salah satu provinsi yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2018 adalah provinsi Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah 2018 diikuti oleh dua pasangan calon. Sedangkan untuk jumlah pemilih yang mempunyai hak suara dan terdaftar pemilih tetap oleh KPU berjumlah 27.068.125 yang tersebar di 115.186 TPS.

Tabel 1.1 Daftar Kandidat Calon Gubernur-Wakil Gubernur Pada Pilgub Jawa Tengah 2018

Pasangan Calon	Partai Pengusung
Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen	PDI-P, NASDEM, DEMOKRAT, PPP
Sudirman Said-Ida Fauziyah	PKB, PKS, PAN, GERINDRA

Selain memiliki ragam etnis, suku dan ras maupun bahasa daerah, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai macam organisasi masyarakat (Ormas) maupun paguyuban paguyuban dari berbagai macam daerah. Organisasi-organisasi tersebut juga memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian politik yang cukup tinggi yang disebabkan oleh kepentingan akan kepemimpinan dan kemajuan akan daerah dan organisasi yang didiaminya.

Salah satu kelompok organisasi masyarakat itu adalah Sapma Pemuda Pancasila, Lindu Aji, Nahdhatul Ulama. Saat ini, organisasi masyarakat sangat sering muncul baik dalam media cetak maupun media sosial yang ada terkait bentuk-

bentuk pergerakan dan program kerja yang mereka lakukan. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dari segi kuantitas dan kualitas, organisasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dari semakin banyaknya masyarakat yang bergabung dalam ormas dan juga meningkatnya program kerja dari masing-masing ormas yang ada di Indonesia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri ada sekitar 344.039 masyarakat yang terdaftar dalam keanggotaan ormas yang terbagi dalam beberapa bagian organisasi yaitu ormas agama, ormas adat/budaya dan ormas nasional.

Organisasi kepemudaan merupakan pilar terpenting dalam suatu kemajuan Bangsa karena Pemuda sebagai sosok penerus bangsa yang kelak menggantikan kedudukan golongan tua dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam sistem pemerintahan, aparatur Negara dan juga dalam sistem politik suatu Negara. Sosok pemuda sangat diperlukan dalam tata sistem politik sebagai sosok yang diperlukan ide-ide pembaharuannya, partisi aktif dalam dunia politik untuk warna baru dalam dunia politik yang saat ini banya di dominasi para golongan tua.

Lemahnya partisipasi dari kalangan pemuda yang notabnya sebagai pemilih baru yang masih minim pengalaman dalam bidang politik membuat kekuatan

politikpun ikut melemah. Selain itu munculnya sikap apatis di kalangan pemuda pun akan turut menghambat pertumbuhan politik yang ada pada Negeri ini karena apabila sikap apatis tersebut muncul maka akan menjadi ancaman besar terhadap kekuatan politik.

Sebab peran generasi muda dalam bidang politik begitu di perlukan kehadirannya. Sikap apatis akan terkalahkan apabila generasi muda sadar akan pentingnya peran mereka dalam dunia politik dan sistem pemerintahan yang kelak akan di nanti-nantikan ide-ide pembaharuan kebijakan pemerintahan dan pembaharuan dalam sistem politik agar bagaimana Indonesia bisa bebas dari money politik dan masyarakat bebas dari Golput pada saat pemilihan umum yang umumnya hal itu marak terjadi di dalam sistem politik di Indonesia.

Disini peneliti memilih Organisasi kepemudaan Sapma Pemuda Pancasila karena Sapma Pemuda Pancasila basis lingkup ataupun rumah bagi generasi muda untuk peduli terhadap sejarah Negara Indonesia dan Membentuk jiwa cinta tanah air. Pengertian dari Sapma Pemuda Pancasila itu sendiri ialah “SATUAN SISWA PELAJAR MAHASISWA PEMUDA

PANCASILA” dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sapma ini adalah wadah bagi generasi muda yang peduli akan tanah air atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana anggota Sapma Pemuda Pancasila tergolong banyak khususnya di Jawa Tengah sendiri.

Jumlah kader Sapma Pemuda Pancasila di Jawa Tengah pada Tahun 2018 menurut data dari pihak penyelenggara acara napak tilas diikuti sekitar 5.624 anggota Sapma Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Tingkat partisipasi organisasi Sapma Pemuda Pancasila menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan jumlahnya yang besarserta kemajemukan masyarakat Jawa Tengah serta politik Jawa Tengah yang menjadi barometer demokrasi yang ada di Indonesia. "Banyaknya anggota yang berlatar belakang politikus dari berbagai partai politik justru sebagai sarana pemersatu sehingga Sapma Pemuda Pancasila bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2018," kata Kepala Bidang Kaderisasi Majelis Pimpinan Wilayah Sapma Pemuda Pancasila Jateng Windo Wijaksodi Semarang. Ia menegaskan bahwa Sapma Pemuda Pancasila Jateng mengambil peran sebagai garda depan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelang tahun politik kedepan.

Hal tersebut dilakukan Sapma Pemuda Pancasila Jateng karena saat ini nilai-nilai Pancasila di masyarakat sudah mulai luntur dan maraknya berita bohong (hoaks), serta ujaran kebencian di berbagai media sosial yang sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Kami ingin membuat suasana kondusif pada tahun politik ini," ujarnya.

Kondisi Sapma Pemuda Pancasila saat ini mendapatkan diskriminasi yang dimana masyarakat awam mengenal Sapma Pemuda Pancasila itu berbasis Premanisme dan keadaan Pilkada Jawa Tengah yang penuh dengan dinamika sehingga penulis meneliti Tingkat Partisipasi Politik Organisasi Sapma Pemuda Pancasila di Pilkada Jawa Tengah Tahun 2018.

Dengan keterangan-keterangan tersebut peneliti menjadi tertarik membahas tentang Sapma Pemuda Pancasila dalam berpartisipasi terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Menurut peneliti dengan banyaknya anggota ataupun Kader Sapma Pemuda Pancasila yang tergolong ataupun mayoritas kadernya tersebut ialah anak-anak muda yang lebih peduli terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga bagi peneliti ini sangat tertarik untuk dibahas untuk melihat seberapa besar partisipasi Sapma Pemuda Pancasila dalam membangun Negara ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu :

1. Apa saja bentuk partisipasi politik Sapma Pemuda Pancasila di Pilgub Jawa Tengah tahun 2018?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik di Pilgub Jawa Tengah tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Dalam rangka melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

b. Untuk menambah dan mengembangkan pemikiran serta pengetahuan penulis secara ilmiah dan sistematis berdasarkan ilmu yang diterima selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

c. Untuk memperluas dan menambah wawasan berpikir penulis berkaitan dengan partisipasi politik Sapma Pemuda Pancasila

2. Tujuan Khusus

Disamping tujuan Umum di atas, penulis juga memiliki tujuan khusus dalam penelitian ini yakni:

a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Sapma Pemuda Pancasila di Jawa Tengah

b. Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik yang dilakukan oleh Sapma Pemuda Pancasila dalam Pilkada Jawa Tengah 2018

c. Menyusun serta membuat alternative kebijakan serta rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian ini yaitu diharapkan mempunyai manfaat secara :

1.4.1 Secara Teoritis :

Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam menambah wawasan, khususnya dalam partisipasi politik Sapma Pemuda Pancasila.

Penelitian ini secara teoritis menambah suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan penelitian lebih lanjut khususnya dalam partisipasi politik. Dari

penelitian ini diharapkan memperkuat teori-teori mengenai partisipasi politik dan kewarganegaraan.

1.4.2. Secara Praktis :

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah yang masih kesulitan dalam perumusan kebijakan yang dapat melindungi seluruh golongan dan kelompok baik mayoritas maupun minoritas. Sehingga secara luas akan dapat dijadikan referensi untuk dapat menyusun kebijakan yang ramah terhadap kelompok minoritas.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dengan terjun langsung pada organisasi Sapma Pemuda Pancasila dan memberikan pengalaman yang berguna bagi kemampuan dan ketrampilan peneliti. Melalui terjun langsung pada lokasi penelitian, peneliti dapat menambah wawasan belajar serta dapat mengetahui proses partisipasi politik organisasi Sapma Pemuda Pancasila.

c. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi ormas Sapma Pemuda Pancasila dan usaha mereka dalam pemenuhan dan pengakuan hak hak mereka. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat membuat

masyarakat bijak dalam menanggapi isu tentang ormas Sapma Pemuda Pancasila di social masyarakat.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kegiatan politik, contohnya adalah dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson memberikan tafsiran mengenai partisipasi politik yang lebih luas.

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik.

Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

1) Keith Fauls

Keith Fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

2) Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*

Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*

4) Ramlan Surbeki memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence).

1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti (1992:140) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud 21 dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status

sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2006:144-145).

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrewsu (2011:56-57)

1) Modernisasi

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern

Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: *Pertama*, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu meningkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku

individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam pilgup langsung memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

A. Tipologi Partisipasi Politik

A. Rahman H.I (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- 1) partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- 2) partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- 3) golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007: 152) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

- 1) Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Partisipasi politik spectator orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- 3) Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- 4) Partisipasi politik pengkritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis.

Pemberian suara dalam pilbup merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Sedangkan Olsen yang dikutip Oleh A. Rahman H.I (2007: 289) memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah 27 kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hara, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut di atas.

Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan.

d. Bentuk Partisipasi Politik

Paige dalam Cholisin (2007:153) merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif).

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'oeed (2011:57-58) yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

1) Partisipasi politik konvensional

- a) Pemberian suara atau voting
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

2) Partisipasi politik nonkonvensional

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok
- e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran
- f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Kemudian David F. Roft dan Frank yang dikutip oleh A Rahman H.I (2007: 286) bentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat

dalam kegiatan politik dijenjangan maka akan membentuk piramida partisipasi politik.

Piramida Partisipasi Politik



(David F. Roth dan Frank L. Wilson, 1976. The Comparative Study of Politics)

Gambar 1: Piramida partisipasi politik

Sumber : A Rahman HI 2007

Kelompok paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson (A Rahman H.I, 2007:287) disebut sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas

kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemuda yakni berupa demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula untuk turut dalam partisipasi pilbup yaitu bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya mengikuti kegiatan kampanye, serta menghadiri diskusi politik didaerahnya. Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam Pilbup. Serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik.

Tabel 1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

No	Bentuk Partisipasi
1.	Melaksanakan sosialisasi pemilu
2.	Melaksanakan pendidikan pemilih
3.	Memilih calon atau pasangan calon partai politik, membantu rencana visi, misi dan program partai dalam pemilu
4.	Memberikan suara sebagai pemilih
5.	Menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu
6.	Mendukung peserta pemilu/calon tertentu
7.	Mengorganisasikan warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif

	kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu
8.	Menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu, dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu
9.	Melakukan survey dan menyebar-luaskan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon
10.	Melaksanakan dan menyebar-luaskan hasil perhitungan cepat pemilu (<i>quick count</i>)

Sumber : www.kemitraan.or.id diakses pada 24 November 2017

1.6 Definisi Konsep

Dalam teori yang telah ditulis oleh penulis melalui berbagai sumber yang telah diolah, penulis mendefinisikan beberapa konsep teori tersebut menjadi :

1. Minoritas : kelompok warga negara yang secara jumlah lebih sedikit dan berada dalam posisi yang tidak dominan, yang memiliki perbedaan khas dari mayoritas warga negara lainnya, dan memiliki solidaritas yang kuat atas persamaan kebudayaan, organisasi, agama, atau etnis
2. Politik Minoritas : Cara kelompok minoritas dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka agar mereka terlepas dari diskriminasi baik dari negara ataupun kelompok mayoritas yang ada.
3. Partisipasi Politik : Kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kegiatan politik, contohnya adalah dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.

1.7. Operasionalisasi Konsep



Sumber: diolah oleh penulis

Dalam melakukan operasioanalisis konsep, penulis memiliki beberapa indikator yaitu

1. Partisipasi politik : Penulis menggunakan teori Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yang membagi bentuk partisipasi politik menjadi 5 yaitu :
 - a. Kegiatan pemilihan : Organisasi Sapma Pemuda Pancasila menggunakan hak memilih dalam Pilgub Jateng 2018
 - b. Lobby : Seseorang yang memiliki posisi dan kekuasaan yang lebih dalam Organisasi Sapma Pemuda Pancasila menghubungi para politisi dengan tujuan mempengaruhi keputusan sesuai dengan kepentingan Organisasi Sapma Pemuda Pancasila
 - c. Kegiatan Organisasi : Anggota beserta jajaran pengurus Sapma Pemuda Pancasila, bersatu dan berhimpun pada satu organisasi yang memiliki kesamaan visi dan misi.
 - d. Contacting : berusaha membangun jejaring dengan para pejabat-pejabat pemerintah.

e. Tindakan kekerasan (*violence*) : melakukan kegiatan yang menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda

Dengan teori yang sudah dipaparkan diatas dan penggambaran kerangka berfikir, peneliti ingin meneliti upaya kelompok minoritas dimana yang diteliti oleh penulis adalah Organisasi Sapma Pemuda Pancasila, melakukan partisipasi politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan . Menurut Sugiyono¹ metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian lainnya ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, obsevasi, tes maupun dokumentasi . Subagyo mengatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembang pemecahan terhadap segala permasalahan . Dilihat dari sudut analisisnya, menurut Saifuddin Azwar penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif

1.8.1. Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori dan gagasan para ahli maupun pemahaman dari peneliti, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan di mana permasalahan yang

akan diteliti diukur dengan menggunakan persepsi. Seperti yang dikatakan Sugiyono, “Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka”². Dengan demikian penelitian ini memungkinkan digunakan teknik analisis statistik untuk mengolah data.

Penelitian ini mengambil desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan *expost facto*. Alasan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah untuk mendeskripsikan partisipasi politik Sapma Pemuda Pancasila yang terlibat dalam beberapa kegiatan Pilgub Jateng 2018. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dikatakan *expost facto* karena di dalam penelitian ini tidak dibuat perlakuan pada objek penelitian melainkan hanya mengungkap fakta pada diri responden.

1.9.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah individu-individu yang menjadi target penelitian yaitu anggota dan pengurus pemuda pancasila yang berdomisili di Jawa Tengah. Kemudian sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, Sekretaris, Anggota. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *non probability sampling*. Dimana teknik *non probability sampling* yang digunakan peneliti adalah *accidental sampling*, didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul atau dengan kata lain sampel adalah individu yang mudah ditemui.

² Sugiyono, *Satistika Untuk Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2007), hal.23

Kemudian untuk menentukan sampel dalam penelitian digunakan rumus Frank Lynch berikut ini.

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

Z = Nilai variabel normal

1. Nilai variabel normal (2,58) untuk tingkat kepercayaan 99%
2. Nilai Variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%
3. Nilai variabel normal (1,65) untuk tingkat kepercayaan 90%

p = harga patokan tertinggi (0,50)

d = sampling error

1. 0,01 untuk $Z = 2,58$
2. 0,05 untuk $Z = 1,96$
3. 0,10 untuk $Z = 1,65$

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut .

Diketahui:

$N = 750$

$Z = 1,65$ maka $d = 0,10$

$p = 0,50$

Sehingga jumlah responden yang harus peneliti penuhi adalah sejumlah 62 responden.

1.9.3. Situs penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Jawa Tengah dipilih karena tingkat sosial masyarakatnya yang plurar dan terbuka. Selain itu, Jawa Tengah menjadi basis terbesar organisasi Sapma Pemuda Pancasila di Indonesia.

1.9.4. Fokus Penelitian

Partisipasi politik Organisasi Sapma Pemuda Pancasila menjadi menarik dibahas dan diungkap bagaimana proses partisipasi politik mereka guna pemenuhan hak mereka baik dalam politik dan hak negara mereka

1. Aspek Partisipasi Politik

Didalam aspek ini, peneliti ingin secara mendalam menganalisa Sejauh apa dan apa saja jenis partisipasi yang dilakukan oleh organisasi Sapma Pemuda Pancasila dan melalui saluran apa saja partisipasi itu dilakukan

2. Aspek *policy maker*

Didalam aspek ini, peneliti ingin melihat bagaimana tanggapan pembuat kebijakan serta politisi dalam menampung dan mengolah aspirasi yang disampaikan oleh Organisasi Sapma pemuda pancasila sehingga aspirasi kelompok ini memiliki nilai atau muatan politis yang dapat mempengaruhi kebijakan publik.

1.9.5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh

Arikanto (2006:145) subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subyek penelitian itu merupakan sumber informasi atau sampel³. Maka informan dan responden yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya :

1. Ketua Pengurus Wilayah Sapma Pemuda Pancasila.

Peneliti memilih Ketua Pengurus Wilayah Sapma Pemuda Pancasila karena Ketua memiliki hak penuh mengetahui setiap perkembangan dari organisasi tersebut.

2. Ketua Pengurus Cabang Sapma Pemuda Pancasila (Semarang)

Peneliti memilih Ketua Pengurus Cabang karena sebagai ketua pengurus cabang yang mengetahui setiap perkembangan dan kebutuhan dari organisasi dalam dunia politik di Semarang.

3. Sekretaris Pengurus Wilayah

Sama seperti Ketua Pengurus Wilayah dimana data setiap anggota atau pun itu kader Pemuda Pancasila yang ikut berpartisipasi dalam pesta politik pilgub Jateng 2018.

4. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Sapma Pemuda Pancasila

5. Kabid Politik Dan Kebangsaan Pengurus Wilayah Sapma Pemuda Pancasila

6. Ketua Komisaris Undip Sapma Pemuda Pancasila

7. Anggota Sapma Pemuda Pancasila Kota Semarang

1.9.6. Jenis Data

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dengan bentuk:

³ Arikunto, Suharsimi. *Op.Cit.* Hal. 145.

1. Kata-kata dan tindakan
2. Sumber tertulis
3. Data hasil wawancara
4. Foto

1.9.7. Sumber Data

Selain menggunakan metode diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Berdasarkan masalah penelitian data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari subyek penelitian melalui wawancara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari data wawancara, observasi, dan foto dari Narasumber yang meliputi Ketua Pengurus Wilayah Sapma Pemuda Pancasila, Ketua Pengurus Cabang kota Semarang, Sekretaris Pengurus Wilayah serta Anggota Sapma Pemuda Pancasila.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia yang diperoleh dari otoritas atau pihak yang berwenang dan mempunyai efisiensi yang tinggi.

1.9.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Teknik Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in depth interview) dan terbuka yaitu metode wawancara dengan bertemu langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan yang relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang kompleks. Melalui wawancara mendalam tersebut akan dapat mengemukakan segala hal yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencari dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, arsip-arsip, media online dan sebagainya yang mendukung untuk mendapatkan data.

1.9.9. Analisis dan Intepretasi Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif.

1.9.10. Kualitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti menguji kualitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk pengecekan atau sebagai pembading terhadap data yang sudah didapat peneliti agar data yang didapat lebih sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan teori karena menggunakan wawancara dan kuesioner. Hal ini memungkinkan akan memperoleh data yang mendalam karena diperoleh dari sudut pandang yang berbeda antar sumber satu dengan sumber lainnya sehingga sudut pandang yang dihasilkan menjadi bervariasi.